

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laju inflasi dapat semakin mengurangi daya beli masyarakat. Untuk mengantisipasi kenaikan inflasi tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis melalui kerjasama atau koordinasi kelembagaan yang ada di daerah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah dan mengatasi ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat. Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dan strategis sehingga harus dikendalikan melalui berbagai upaya atau kegiatan secara terencana, bersinergi dan komprehensif. Inflasi yang terjaga adalah syarat dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak riil pada kesejahteraan masyarakat, karena itu langkah yang dilakukan dalam pengendalian memerlukan sinergi berbagai pihak. Dalam era globalisasi pergerakan harga suatu produk akan ditentukan oleh mekanisme pasar, karena intervensi pemerintah terhadap stabilitas harga terbatas pada bagaimana mengupayakan agar barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia di pasar dalam jumlah yang mencukupi dan arus distribusi lancar, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga/keresahan masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, dan mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan. Salah satu cara menstabilkan harga dengan mengadakan operasi pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi berupa sembako yang dibutuhkan masyarakat. Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk Kabupaten yang menghitung Inflasi hanya dua Daerah yaitu Kota Bima dan Kota Mataram, tetapi berdasarkan Laporan Perkembangan harga kebutuhan pangan dan terjadi kenaikan (Inflasi) pada komodite – komodite tertentu dan Laporan Perkembangan kondisi cadangan pangan masyarakat Kabupaten Lombok Utara Triwulan II Tahun 2021 • Kebutuhan Pangan pada Minggu ke IV (Empat) pada Bulan April Tahun 2021 di Pasar Tanjung. a. Beras Medium b. Beras Super c. Beras Super d. Gula Pasir e. Daging Ayam Broiler f. Telur Ayam Broiler isi 30 butir g. Kedelai Impor h. Kedelai Lokal i. Cabe Rawit j. Kacang Hijau • Kebutuhan Pangan pada Minggu ke IV (Empat) pada Bulan Mei Tahun 2021. a. Minyak Goreng Tanpa Merek b. Jagung c. Kedelai Lokal • Kebutuhan Pangan pada Minggu ke IV (Empat) pada Bulan Juni Tahun 2021 a. Beras Super b. Minyak Goreng Bimoli 1 Ltr c. Daging Ayam Broiler d. Cabe Merah Besar Biasa e. Cabe Rawit f. Tomat g. Buncis h. Bawang Merah i. Bawang Putih

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mencermati terjadinya kenaikan harga – harga kebutuhan pokok (Inflasi) a. Kenaikan yang terjadi di Volatile Food (Komoditas Pangan) diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan faktor musiman adanya COVID-19 yang memicu tingkat konsumsi yang lebih tinggi b. Kenaikan harga komponen diperkirakan meningkat karena didorong oleh peningkatan ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen terhadap harga 2 (dua) bulan yang akan datang meningkat, yang tercermin dari laporan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung harga kebutuhan barang tertentu mengalami kenaikan. 2. Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara - Pada tanggal 9 April 2021 melaksanakan survei harga kebutuhan pokok dan bangunan di pasar Tanjung bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan sejumlah SKPD terkait

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga terutama untuk komoditas volatile Food di Kabupaten Lombok Utara, TPID Kabupaten Lombok Utara telah melakukan beberapa langkah yaitu: 1. Dilakukan

koordinasi serta peningkatan kerjasama dengan daerah/wilayah penghasil komoditas pangan serta melalui pertukaran produk agar ketersediaan stok terjamin dimasing-masing daerah/wilayah 2. Tim pengendalian inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) melakukan/pemantauan perkembangan harga pangan kepasar-kepasar tradisional maupun sidak ke distributor-distributor untuk menjalin ketersediaan pasokan pangan dalam menjadi stabilitas harga. 3. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 6 Mei 2021. Pada kesempatan tersebut dari OPD terkait dan dari lintas sektoral memaparkan tentang kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, penyampaian informasi tentang keadaan cuaca serta penyampaian perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Utara diawal tahun 2021 sebagai berikut : □

Pembahasan a. Adanya kenaikan harga beberapa komoditas di pertengahan tahun yang memicu kenaikan inflasi antara lain; harga cabai dan daging dikarenakan ada penurunan jumlah hasil tanam cabai (gagal panen karena virus tanaman cabai dan cuaca yang ekstrim) dan penyebab lainnya karena adanya indikasi pengiriman cabai keluar daerah. Harga daging juga mengalami kenaikan karena banyak kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga komoditas. □ Hasil a. Pemerintah perlu ambil langkah-langkah preventif dalam menghadapi kenaikan harga pangan akibat gagal panen (karena virus tanaman cabai dan curah hujan yang tinggi), ketersediaan pasokan, dan dalam situasi pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) melalui :

- Pengawasan /pemantauan terhadap kenaikan harga pangan lebih intensif dilakukan, terutama pada kenaikan cabai dan daging.
- Peningkatan kerjasama dengan daerah/wilayah penghasil komoditi untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan menghimbau masyarakat agar tidak panik buying yang memicu kenaikan harga barang.
- Pengawasan terhadap jalur distribusi (keluar masuk barang) antar daerah/pulau, untuk memastikan komoditas yang keluar tidak mempengaruhi kestabilan harga barang.

2. Telah dilakukan koordinasi antara tim pengendalian inflasi daerah dalam hal ini Dinas koperasi, Perindustrian dan perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Satgas Pangan (Polres Lombok Utara) dengan Hiswana Migas terkait data penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi, mengurangi pendapatan riil, dan mengakibatkan penurunan standar hidup masyarakat serta berpotensi meningkatkan kemiskinan b. indikator ekonomi yang sangat penting dan strategis sehingga harus dikendalikan melalui berbagai upaya atau kegiatan secara terencana, bersinergi dan komprehensif c. Mensinkronkan program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Pemerintah perlu ambil langkah-langkah preventif dalam menghadapi kenaikan harga pangan b. Penguatan produksi pangan terus diperkuat melalui penggunaan bibit unggul, penataan kalender tanam, hingga pemanfaatan teknologi pertanian terkini c. Perlu Inovasi-inovasi yang terkait untuk pengendalian harga d. Mengupayakan agar barang-barang yang

dibutuhkan oleh masyarakat tersedia di pasaran dalam jumlah yang mencukupi dan arus distribusi barang lancar